Bakri La Suhu, S.IP.,M.A

Sengketa TAPAL BATAS di Tanah Kesultanan

Editor :
Abdullah Kaunar
Rahmat Suaib

eureka media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-196-8
9 786234 871968

SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN

Penulis : Bakri La Suhu, S.IP.,M.A

Editor : Abdullah Kaunar
Rahmat Suaib

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-196-8

Diterbitkan oleh :**EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan buku dengan Judul "**SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN"**. Buku ini juga secara spesifik menguraikan berbagai persoalan yang terjadi dalam sengketa tapal batas di tanah kesultanan; seperti perebutan *resource* dan proses mediasi.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai kalangan terutama teman-teman serta keluarga, maka sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan Buku ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih pada semua kalangan yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca.

Selaku penulis, saya menyadari sepenuhnya bahwa buku yang penulis tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritikan yang membangun dari semua kalangan sangatlah dibutuhkan demi penyempurnaan buku ini. Di penghujung pengantar ini, penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu serta semoga juga buku ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Ternate, 11 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB 1 PROBLEMATIKA SENGKETA TAPAL BATAS
DI TANAH KESULTANAN TERNATE 1
BAB 2 SEKILAS PANDANG SULAMADAHA DAN
TAKOME 24
BAB 3 PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH
KESULTANAN TERNATE 34
BAB 4 MEDIASI SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH
KESULTANAN TERNATE 61
DAFTAR PUSTAKA 79
TENTANG PENULIS 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Peduduk Kelurahan Sulamadaha Berdasarkan Skala Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 27
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Takome Berdasarkan Skala umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 28
Tabel 3 Prasarana Ibadah Kelurahan Sulamadaha 31
Tabel 4 Prasarana Ibadah Kelurahan Takome 31
Tabel 5 Klaim Tapal Batas Menurut Versi Kelurahan Sulamadaha-Takome 42
Tabel 6 Pendapatan Warga di Tempat Pariwisata Jiko Malamo 53

SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A

BAB 1

PROBLEMATIKA SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE

A. Pendahuluan

Konflik dalam kehidupan sosial masyarakat seringkali terjadi kapan dimana pun, konflik sosial yang terjadi antar warga akhir-akhir ini semakin sering menjadi pemberitaan baik di media massa, cetak maupun elektronik. Beragamnya masalah konflik yang timbul mulai dari masalah yang sepele antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok, saling mengejek antar pemuda/pemudi, persoalan perbedaan pendapat dan pandangan antar warga sampai pada level sengketa tapal batas antar kelurahan/desa akhir ini patut dijadikan sebagai bahan renungan bersama.

Sehubungan dengan hal ini, Kartiko (2007)[1] mengatakan sengketa batas daerah disebabkan karena beberapa aspek :

---

[1](http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batasdaerah/ Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah Posted by Redaksi on Desember 10, 2007).

BAB 2

SEKILAS PANDANG SULAMADAHA DAN TAKOME

A. Sejarah Singkat Keluruhan Sulamadaha dan Kelurahan Takome

1. Kelurahan Sulamadaha[23]

Sejarah singkat sebelum terbentuknya desa atau kelurahan Sulamadaha, pada jaman dahulu menurut cerita orang tua-tua adat Sulamadaha terbentuk dalam golongan 4 soa yakni, Soa Alafai, Soa Afu, Soa Tabanga dan Soa Buku Gila.

Seiring dengan perkembangannya dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan melalui perjuangan yang panjang serta kegigihan dan keuletan parah tokoh masyrakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kekompakan masyarakat, akhirnya Sulamadaha dinyatakan resmi menjadi Desa pada tahun 1999 dimana pembentukan daerah kota madya Ternate. Kemudian desa Sulamadaha menjadi bentuk Kelurahan pada tahun 2000 yang yang pimpin oleh bapak M. Nur Ibrahim, yang menjabat selama 10

[23] Sumber : Kantor Lurah Sulamadaha, tahun 2017

BAB 3

PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah[25].

Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada

---

[25] Achmad Chulaemi, 1992. Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP. hal. 9

BAB 4

MEDIASI SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE

A. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

1. Mediasi di Tingkat Kelurahan

Sengketa tapal batas antara kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome pada awalnya bermula dari masalah tanah/lahan yang diperebutkan antara individu dengan individu[66] hingga bermuara pada terjadinya bentrok diantara warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Kejadian ini dikarenakan ada yang dirugikan dalam pembuatan jalan menuju Jiko Malamo, pihak satu mengklaim bahwa tanah/lahan ini milik dirinya dan pihak lainnya juga mengklaim tanah/lahan miliknya, sehingga proses perebutan lahan di wilayah tanah Kesultanan Ternate menarik perhatian warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome.

---

[66] Bapak Hamja dengan Bapak Mahmud yang mengklaim sebagai pemilik lahan disekitaran Jiko Malamo

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik*. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta.

I Made Pasek Diantha, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam demokrasi,* Abardin, Bandung

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Rajaraja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).

Ngakan, Putu Oka et.al, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*.

Peter Schroder, 2003. *Strategi Politik*. Penerbit: Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta

Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Robert van Niel, "Rights to Land in Java", dalam T. Ibrahim Alfian (eds), *Dari Babad Dan Hikayat Sampai Sejarah*

Kritis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Soeryono Soekanto, 1995. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simon Fisher, dkk, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta.

Wasistiono Sadu, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Penerbit Fokusmedia, Bandung

Sumber Lain : Regulasi, Makalah, Artikel dan Internet

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Ismail Nurhasan, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung.

Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel

Chulaemi Achmad, 1992. *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP

http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas daerah/Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah Posted by Redaksi on Desember 10, 2007. Kartiko, dalam acara Lokakarya Penataan Batas-batas Daerah dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara di Anyer Sabtu (8/12) sampai Minggu (9/12) tahun 2007.Diakses tanggal 05-04-2017

http://gorontalo-wwwtaminmunablogspotcom.blogspot.com/2010/03/pilkada-dan-konflik-politik.html. diakses tgl 05-04-2017

www.deliknews.com/2015/10/18/dipicu-sengketa-tapal-batas-pemkot-ternate-digugat -warga/ diakses tgl 06-4-2017

http://portal.malutpost.co.id/en/pro-public/item/5249-maluku-utara-darurat-konflik-batas-wilayah, pada tgl 13-05-2017

TENTANG PENULIS

Bakri La Suhu, S.IP, M.A, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdi sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak.

Beberapa artikel yang pernah penulis publis baik pada jurnal Internasional terindeks Schopus maupun jurnal nasional. Artikel tersebut dapat ditelusuri pada google scholar QZOnpycAAAAJ&hl dan Sinta ID 6096386, Buku yang pernah penulis tulis yakni "KONFLIK PEREBUTAN

RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021" dan "KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH" tahun 2022.